

## BAB. I .

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan merupakan sesuatu hal yang menjadi bahan menarik untuk dikaji dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan dan sampai pada abad 20 serta sampai saat ini. Sehingga para filosof berbagai intervertasi yang menterjemahkan terkait tentang kekuasaan.

Pada umumnya kekuasaan dipandang sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia yang mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>1</sup> Dalam hal ini, kekuasaan sudah menjadi objek perhatian oleh sebagian banyak manusia dengan berbagai macam keinginan dan tujuan yang dicapainya. Maka manusia tersebut membutuhkan sebuah regulasi kekuasaan dimana untuk mengakomodir segala keinginan dan tujuannya dalam mengendalikan atas orang atau kelompok lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Pandangan kekuasaan mempunyai devinisi yang bukan hanya tunggal namun juga secara universal. Misal dalam pandangan sosial yang dimana menurut Osip K. Flechtheim mengatakan kekuasaan sosial adalah “keseluruhan dan kemampuan, hubungan – hubungan dan proses – proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan – tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan”.<sup>2</sup> Dan sedangkan devinisi kekuasaan menurut Robert M. MacIver merupakan “kekuasaan

<sup>1</sup> Budiardjo Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm 35

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 35

sosial merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah – laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan segala alat dan cara yang tersedia”.<sup>3</sup>

Titik fokus kekuasaan pada dasarnya terdapat pada negara. Hal ini melihat dari pandangan kekuasaan politik. Maka, dari pada itu ossip K. Flechteim membedakan dua macam kekuasaan politik adalah *pertama* ; Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau *state power*), seperti lembaga – lembaga pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. *Kedua* ; bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan pada negara.<sup>4</sup> Artinya kekuasaan ini terwujud dari luar kelembagaan negara, yang memiliki sifat politik seperti partai politik, asosiasi – asosiasi dan aliran sosial lainnya. Di samping itu kekuasaan sosial yang tidak melakukan kegiatan – kegiatan politik namun suatu saat dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan misalnya organisasi mahasiswa, ormas, SLM dan sebagainya.

Namun, kekuasaan negara suatu keniscayaan harus ada di tengah – tengah publik. Pada tingkat kesadaran individu, negara baru dirasakan keberadaanya manakala ia berbenturan dengan kekuasaan. Bahwa ada suatu realitas kekuasaan yang ada pada dirinya, yang berada pada pada atmosfer publik, namun cukup berpengaruh pada kehidupan sehari – hari. Dari optik kekuasaan dan legitimasi dalam wacana publik, kenyataan itu disebut sebagai realitas kekuasaan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Sebagaimana plato dan ariestoles menyatakan bahwa negara

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>5</sup> Arif Andi dan Pateria Nezar, *Negara dan Hegomoni*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hal. 23

membutuhkan kekuasaan yang mutlak untuk mendidik warganya dengan nilai – nilai moral yang rasional.

Kekuasaan negara dalam hal ini dibingkai dengan kekuatan kekuasaan politik. Sehingga menimbulkan suatu sistem dan sistem tersebut digunakan untuk memperoleh kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Terkait dengan kekuasaan tersebut, maka timbul suatu nuasa bagaimana harus mempertahankan status quo kekuasaan yang dimiliki, walaupun bukan dari individunya melainkan dari keluarga atau kelompoknya.

Dalam hal ini dapat kita lihat dari fenomena proses rekrumen pemimpin bangsa kita ini yaitu di Indonesia yang dimana para pemimpin baik di daerah maupun di skala nasional berupaya mempertahankan status kekuasaannya walaupun secara sistem aturan dalam perekrumenan hanya dua kali periodeisasi namun hal ini tetap dicari cela untuk mendapatkan kekuasaan tersebut dengan mencalonkan istri, anak atau kerabat dan keluarganya, tanpa melihat dari kapabilitas dan integritas untuk menjadi pemimpin yang akan memperoleh kekuasaan dalam instansi pemerintah.

Di samping itu juga, dibalik untuk memperthankan status quo kekuasaan melalui kedekatan keluarga, hal ini juga melibatkan realitas perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Di mana penguasa memiliki kekuasaan kedudukan struktural dalam instansi pemerintahan dan pengusaha memiliki kekuasaan dalam hal fenensial di luar instansi pemerintahan, maka fenomena seperti akan mempengaruhi segala kebijakan – kebijakan publik yang selalu di intervensi oleh pemodal.

Berbicara mengenai realitas perselingkuhan penguasa dan pengusaha dapat disebut sebagai kelompok yang meng-hegemoni, di mana Hegemoni di sini merupakan fenomena sosial yang selalu mendominasi. Dimulai dari hegemoni pasar perdagangan yang menguasai semua *line* perekonomian, maupun hegemoni kekuasaan yang selalu mempertahankan status quo nya. Dilihat dari sisi lain, ada terdapat hegemoni yang berbentuk : sukuisme, agama, ras, warna kulit, bahasa , dan budaya. Hingga pluralisme ini akan membentuk ego-sentris promodialisme yang kokoh.

Pluralisme yang berkembang baik, sebenarnya merupakan hal kekayaan yang dapat dibanggakan oleh suatu bangsa. Namun, ketika pluralisme ini disandarkan dengan kekuasaan dan kekuatan pasar (ekonomi), maka tidak heran jika sub-pluralisme akan membantu partikel-partikel sosial dan meng-hegemoni untuk mempertahankan status sosialnya.

Ekonomi menjadi poros kekuatan untuk regulasi kekuasaan. Bahkan sudah menjadi opini publik bahwa hanya orang kaya saja yang bisa menjadi pemimpin, dan tanpa memandang kapabilitas kepribadian. kekuatan Ekonomi sudah menjadi panglima kesemua sudut kepentingan. Sehingga sudah menjadi rahasia umum, kalau segala urusan selalu disandarkan dengan angka – angka nilai finansial. Mulai dari rekrutment Pegawai, kedudukan status golongan, urusan birokrasi pelayanan publik (Keamanan, Pajak, KTP, KK, surat Izin, dst) dan sampai pada tataran untuk mendapatkan regulasi politik (kekuasaan) dengan mekanisme disebut dengan *many politic*.

Dalam memperoleh Kekuasaan sangat rentan dengan melakukan apapun. Mulai hal dalam kebaikan sampai pada wilayah kecurangan. Maka tidak heran jika penguasa mendapatkan suntikan dana dari pengusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan maunpun sebaliknya dari pihak pengusaha tidak merasa keberatan untuk memberikan kucuran dana untuk penguasa, demi memperoleh pengendali kebijakan publik dalam hal ini di bidang pembangunan yang menggunakan jasa kontaktor (pengusaha).

Hubungan antara penguasa dan pengusaha dapat didiskrepsikan dalam proses-proses yang mengindikasikan bahwa penguasa dan pengusaha melebur menjadi kualisi yang kokoh, artinya meng-hegomonik menjadi kekuatan politik yang dalam mengregulasikan realitas kekuasaan.

Hegomoni pada dasar adalah dimiliki oleh konsep Antonio Gramsci dalam teori hegomninya, namun tidak terlepas dari teori – teori dasar dari pemikir lainnya, misalnya marxis dan leninis. Gramsci memberikan sumbangan devinisi terkait marxis klasik yang lahirnya konsep kelas. Sumbangan yang nyata analisisinya mengenai hubungan kekuatan politik. Ia mengambil contoh dalam lahirnya kapitalis, dan membedakan tiga fase perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase yang pertama adalah ekonomi-korporatif (sering disingkat dengan korporasi) sedangkan ketiga adalah fase hegemoni.<sup>6</sup>

Penguasa dan pengusaha memiliki suatu dasar persamaan dan perbedaaan dalam peran dan statusnya di publik. Dari sisi persamaan, dua elemen ini sama – sama bagian yang mendominasi pada golongan yang lain, sehingga dengan

---

<sup>6</sup> Simon Roger, *Gagasan – Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 34.

hal ini membuat kelompok yang lebih rendah merasa ketergantungan atas kebutuhan hidupnya. Dari sisi penguasa yang memiliki kekuatan kekuasaan, yang dimana memiliki berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan publik mulai dari ekonomi, sosial, politik, hukum dst. Dan sama halnya pada elemen pengusaha yang sangat kuat dalam hal kekuatan finansial, yang akan mempengaruhi berbagai macam stabilitas kekuasaan dan kebijakan maupun bagi publik itu sendiri.

Selanjutnya dalam hal perbedaan antara penguasa dan pengusaha. Diantaranya, dalam hal orientasi yang titik pijak yang sangat berbeda namun dengan sifat yang sama yaitu sama-sama mendominasi. Penguasa memiliki orientasi pelayanan yang di mana hal ini secara titik idealnya penguasa yang di mana menguasai *line* birokrasi pelayanan publik atau masyarakat, sehingga dalam pelayanan birokrasi membuat konstruksi sosial menjadi ketergantungan publik terhadap penguasa. Sedangkan, pengusaha berorientasi dalam hal *profit oriented* (orientasi-keuntungan). Maka, kecenderungan pengusaha yang menjadi titik sentral dalam hal ekonomi yang akan mengeksploitasi demi tercapainya sebuah keuntungan terhadap publik atau masyarakat yang menjadi objek dari pengusaha.

Jadi, bagaimana jika penguasa dan pengusaha menjadi korporasi yang kuat mendominasi dan menguasai. Sehingga, penguasa dan pengusaha menjadi sebuah hegemoni yang akan selalu melanggengkan status quo-nya dalam hal kekuasaan, melalui dengan fasilitas dan fungsi yang mereka miliki. Maka, dipandang perlu jika hal ini patut untuk dikaji dan dianalisis, terkait dengan mekanisme reproduksi kekuasaan-nya.

Selanjutnya, terkait dengan penguasa dan pengusaha yang membentuk sebuah hegemoni yang kuat dari kelompok kelas elite. Maka penulis diskripsikan melalui kerangka teori, konsep dan gagasan pemikiran politik perspektif Antonio Gramsci yang terkenal dalam teori Hegemoni. Hal ini difaktorkan konsep hegemoni secara teoritik bermula pada karya Antonio Gramsci walaupun dekade sebelumnya marxis dan linin juga pernah membuat karya terkait dengan hegemoni namun dalam pengertian dan penerapan teori yang berbeda dengan Gramsci.

Relevansi teoritik ataupun gagasan politik Gramsci yang melibatkan antara hegemoni pengusaha yang akan menjadi korporasi yang menguasai pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam hal ini, atas analisis teori hegemoni Gramsci akan disandingkan dengan implementasi kekuasaan di Indonesia secara kontemporer yaitu pada era Reformasi dalam hal objek penelitian pada masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono beserta penyangga kekuasaannya.

Misalnya dalam keterlibatan Group Sampoerna dalam kekuasaan SBY. Di mana Sampoerna yang terlibat dalam kasus Bank Century, Sampoerna berlindung dikekuasaan SBY sehingga sampai saat ini pengusaha sebesar Boedi Sampoerna tidak tersentuh oleh hukum, selanjutnya, Group Bakrie yang sebagai koordinatornya adalah Aburizal Bakrie sekaligus politisi nasional yang bisa mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Bakrie dan SBY saat ini merupakan satu gerbong di barisan pemerintahan. Keterlibatan Bakrie juga terjadi korporatif penguasa dan pengusaha antara SBY dengan Bakrie, melainkan dalam kasus lumpur Lapindo di Siduwardjo Jawa Timur. Dan juga sama halnya dalam keterlibatan Taufik Kiemas di dalam kekuasaan SBY, di mana Taufik Kiemas yang dirangkul oleh SBY dan dijadikan

sebagai ketua MPR-RI. Ini juga salah satu korporatif yang terjadi di Negara ini, perundingan antara kedua tokoh ini dilaksanakan untuk perlindungan hukum yang melibatkan Taufik Kiemas dalam beberapa kasus di masa pemerintahan istrinya Megawati Soekarno Putri, di samping itu juga SBY memiliki kepentingan atas pengaman tekanan oposisi di Parlemen.

Korporasi pengusaha dan penguasa di atas, merupakan sebagai besar yang terjadi di Negara Indonesia, hal ini juga terjadi dari pusat sampai ke daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Maka dengan ini, penulis memberi judul penelitian yaitu ***“Hegemoni Pengusaha sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan (analisis pemikiran politik Antonio Gramsci terhadap kekuasaan Soesilo Bambang Yudhoyono)”***.

Akhirnya perlu penulis tegaskan bahwa penulis bermaksud mengkaji pemikiran Antonio Gramsci dalam konteks titik fokus penelitian dalam hal Kekuasaan, simbiosis metamorfosa pengusaha menjadi penguasa, dan konflik implementasi di Indonesia pada era reformasi. Karena kedua elemen tersebut pengusaha dan penguasa menjadi masalah aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait mengenai kesejahteraan masyarakat yang terikat dengan negara di Indonesia. Sehingga penulis berharap dapat membantu memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia bagaimana hegemoni pengusaha sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan perspektif pemikiran politik Antonio Gramsci.



## **B. Rumusan Masalah**

*Bagaimana Hegemoni pengusaha sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan prespektif Pemikiran Politik Antonio Gramsci dalam praktek kekuasaan Soesilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II?*

## **C. Batasan Permasalahan**

Dalam setiap penulisan ilmiah, batasan masalah menjadi hal yang sangat penting karena sebagai pembatas fokus penelitian. Jika tidak diadakan pembatasan masalah ini maka penelitian yang dikaji akan menjadi melebar dan cenderung menjadi bias. Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis dalam meneliti hegemoni pengusaha sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dalam analisis politik Antonio Gramsci. Dibatasi dalam konteks sosial politik terkait dengan regulasi kekuasaan yang diperoleh dari kelompok pengusaha dan penguasa, khususnya yang dalam mempertahankan status quo yang dimiliki. Dengan demikian setidaknya ada dua variabel yang menjadi pokok penelitian ini diantaranya Penguasa dan Pengusaha yang terdapat dalam kerangka teoritik Antonio Gramsci yaitu Hegemoni dan analisis ini dikombinasikan dengan kasus – kasus di Indonesia pada era Reformasi dan lebih khususnya dalam studi kasus pada masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono yang disingkat dengan sebutan SBY bersama Kroni – kroninya.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pemikiran Antonio Gramsci mengenai

teori Hegomoni. Dan melihat aplikasi dari implementasi terkait dengan kekuasaan di Indonesia.

- b. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prektek Hegemoni Pengusaha pada kekuasaan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II .

## 2) Manfaat

- a. Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran kepada generasi bangsa Indonesia mengenai Hegomoni pengusaha sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan.
- b. Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan konstibusi bagi perkembangan ilmu politik pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya, tentang hegomoni pengusaha sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan melalui analisis politik Antonio Gramsci.

## E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teoritik merupakan teori – teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antar konsep.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989, hal . 12

## 1) Pemikiran

Kata pemikiran berasal dari kata “pikir” yang berarti “ide”.<sup>8</sup> Kemudian kata “pikir” mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berfungsi sebagai pembentukan kata abstrak menjadi “pemikiran” yang berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan ide – ide.<sup>9</sup> Pemikiran merupakan hasil dari pemikiran oleh seseorang atau sekelompok orang. Pemikiran adalah kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah berfikir menurut kamus besar bahasa Indonesia, pikiran adalah hasil “buah berfikir” sedangkan pemikiran adalah “proses, cara, pembuatan memikir” pemikiran adalah hasil dari akumulasi dari pikiran.<sup>10</sup>

Kata “pikiran” mengandung pengertian rangkap ia sering dipergunakan dengan berbagai arti dan pengetahuan, pemikiran dipakai dengan arti “pengetahuan Umum” dalam hal ini pemikiran merupakan bagian dari pengetahuan. Pengetahuan yang mungkin khusus dan mungkin umum. Pemikiran mungkin juga berarti proses berfikir yaitu konsepsi, penentuan dan pertimbangan sedang memikirkan sesuatu maka ini mungkin berarti bahwa saya sedang

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1980, hal 103

<sup>9</sup> Supriadi, *Pemuntun Pelajaran Bahasa dan Sastra*, berdasarkan Kurikulum 1984, Ganexa Exact, Bandung 1986 hal 27

<sup>10</sup> Abdul Azis Thaba, Op. Cit, Hal 83

mencoba mempertimbangkan sesuatu pemikiran juga berarti hasil berpikir secara konsep, ketentuan dan pertimbangan.<sup>11</sup>

## 2) Pemikiran Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.<sup>12</sup> Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dan kegiatan politik, b) cara-cara pencapaian tujuan, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain. masyarakat, kerja sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Partap Sing Mehra dan Jazir Burhan, *Pengantar Logika Tradisional*, Bani Cipta, Bandung, 1988, hal 5

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.2006. Hal.30

<sup>13</sup> *Ibid.*

Menurut Thomas P. Jenkis dalam *The Study Of Political Theory* dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.<sup>14</sup>

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (*value*) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideology, dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### 1) Filsafat Politik (*political philosophy*)

Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari alam semesta (*universe*) dengan sifat dan hakekat dari kehidupan politik dunia fana ini. pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan politik yang menyangkut alam semesta seperti *metaphysika* dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut filsuf Yunani Plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai "kehidupan yang lebih baik" (*good life*) yang dicita-citakan olehnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 30 – 31

## 2) Teori Politik Sistematis (*Systematic Political Theory*)

Teori-teori ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Misalnya, dalam abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam itu sendiri.

## 3) Ideologi Politik (*Political Ideologi*)

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idea, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu "weltanschauung", yang dimiliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar-dasar ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola

tata-tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (*action-oriented*).

Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat di mana dia berada, dan sering harus mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas. Contoh dari beberapa ideologi atau doktrin politik ialah misalnya demokrasi, Marxisme-Leninisme, liberalisme, fasisme, dan sebagainya diantara mana Marxisme-Leninisme merupakan ideologi yang sifat doktriner dan sifat militannya paling menonjol.<sup>16</sup>

- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan *non-valuational* (suatu istilah yang dewasa ini sering dipakai ialah "*value free*" (bebas nilai)). Ia biasanya bersifat diskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 31-32

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan kongklusi-kongklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran dalam mendasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidahnya akan bersumber pada pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi pemikiran politik adalah jenis pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat politik.<sup>17</sup>

Pemikiran politik dapat didefinisikan dengan melihat masalah-masalah dan topik-topiknya, yaitu jenis pikiran yang bertujuan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik. Sementara yang disebut dengan masyarakat politik itu sendiri adalah masyarakat yang mempunyai lembaga kekuasaan khusus yang dapat diadopsi, yang mengatur masyarakat. Kemudian hukum dan undang-undang itu diaplikasikan kepada masyarakat dan memaksa mereka untuk mematuhi. Lalu undang-undang itu dipatuhi secara umum oleh masyarakat dan diakui mempunyai suatu kekuatan dengan suka rela atau secara terpaksa. Juga diakui sebagai kekuatan tertinggi dalam masyarakat itu dan yang dapat memberikan material.

Sedangkan politik didefinisikan sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Namun, secara definisi modern politik mencakup pengaturan

---

<sup>17</sup> Tijani Abd. Kadar Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*. Gema Insani Press Jakarta. Hal. VII



negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata memerintah dan mengatur saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan terorganisir serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.

### 3) Konsep Hegemoni

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno yang disebut 'eugemonia', sebagaimana dikemukakan encyclopedia britannica dalam preteknya di Yunani, diterapkan untuk menerapkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara – negara kota (*polis atau citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukann oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara – negara lain yang sejajar.<sup>18</sup>

Dalam pengertian pada zaman saat ini hegemoni merupakan suatu dominasi dari kelas tertentu kepada kelas – kelas sosial yang lain dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatan Gramsci terhadap Machhieavelli, *the prince* (sang penguasa), Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari 'perspektif ganda' suatu tindakan politik, yaitu kekuatan dan konsesus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan.<sup>19</sup> Hegemoni bukan merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekerasan melainkan dengan menggunakan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi.

---

<sup>18</sup> Herdarto, 1999;73

<sup>19</sup> Simon Roger, *Gagasa – Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 19

Dalam pengertian di zaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara – negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegral dalam negara “ Pemimpin”. Dalam konteks politik internasional misalnya, pada periode perang dingin, pertarungan pengaruh antara negara adikuasa Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet, pada masa perang dingin, biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik di Dunia.<sup>20</sup> Maka, hegemoni adalah merupakan suatu organisasi kosesnsus.

Keperpustakaan Marxis menunjukkan, bahwa konsep hegemoni secara historis pertamakali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov (Bockock 1986;24). Konsep ini dibangun untuk meruntuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu pada kepentingan hegemonik proleteriats serta perwakilan politik mereka serta aliansi – aliansi dengan kelompok lain seperti : kaum borjuis kritis, petani dan intelektual yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.<sup>21</sup>

Berangkat dari definisi ini, Lenin mengembangkannya, sebagaimana dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja Rusia harus bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam revolusi demokratis – burjuis untuk menggulingkan kekuatan bangsa Tsar.

---

<sup>20</sup> Partria Nezar dan Arif Andi, *Negara Dan Hegemoni*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 116

<sup>21</sup> Ibid hal 116 aln 2

Dengan cara ini , kelas pekerja , yang pada saat itu masi merupakan kelompok minoritas, maupun memperoleh dukungan dari mayoritas.<sup>22</sup>

Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk melakukan revolusi, suatu srategis yang harus dijalankan kelas pekerja dan anggota – anggotanya untuk memperoleh dukungan dari manyoritas. Gramsci menambahkan demensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebuk kekuasaan negara dan maupun dalam memperhankan kekuasaan yang sudah diperoleh.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang Gramsci catatan pertamanya mengenai sejarah Itali, ditulis pada bab pertama dari 29 bab Prison notebooks, diberi judul “kepemimpinan politik kelas sebelum dan sesudah meraih kekuasaan pemerintahan”. Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual:

Suatu kelompok sosial biasa, bahkan harus menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); siapapun itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan

---

<sup>22</sup> Simon Roger, *Gagasa – Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 19.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 21.

tetap berada ditangan kelompok, maka mereka harus tetap “memimpin”.<sup>24</sup>

Jadi, Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara dan konsepnya tentang hegemoni. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Konsep ideologi yang dibangun dengan memasukan beberapa konsep lainnya yang berkaitan dengannya.<sup>25</sup>

Hegemoni terutama dipahami dalam pengertian aliansi antar kelas atau kelompok kelas, hal ini yang dipahami oleh Lenin. Gramsci menambahkan dimensi baru yang sangat penting dengan mengajukan konsep tentang nasional –kerakyatan: suatu kelas tidak bisa meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri, mereka harus

---

<sup>24</sup> SPN 57-58

<sup>25</sup> Simon Roger, *Gagasa – Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 22.

memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni, yang tidak muncul secara langsung dari hubungan – hubungan produksi. Misalnya perjuangan – perjuangan radikal rakyat bagi kebebasan sipil, gerakan – gerakan pembebasan nasional, gerakan perempuan , gerakan perdamaian dan berbagai gerakan yang mengungkapkan tuntutan dari minoritas etnis, dari kaum pemuda dan pelajar. Gerakan itu memiliki sifat tersendiri dan tidak pahami semata – mata sebagai perjuangan kelas selainpun mempunyai kaitannya. Jadi, hegemoni mempunyai dimensi nasional – kerakyatan, di samping deminsi kelas. Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi yang luas mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat, sehingga masing – masing kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya sendiri memberikan sumbangan dalam gerakan menuju sosialisme. Strategi membangun suatu kelompok besar yang terdiri berbagai kekuatan sosial yang disatukan oleh konsepsi yang sama tentang dunia inilah yang disebut Gramsci perang posisi (*war of position*).<sup>26</sup>

Menganalisis perang posisi yang berlangsung antara dua kelas untuk meraih hegemoni, Gramsci melakukan memberdaan tegas antara strategi yang diterapkan kelas kapitalis dengan strategi yang diterapkan kelas pekerja. Strategi yang diterapkan kaum burjuis yang mempunyai sifat

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 24

khusus yang dinamakan revolusi pasif (*passive revolution*). Ia mengembangkan konsep ini dari analisisnya *Risorgiment*, gerakan penyatuan Itali pada pertengahan abad ke-18.<sup>27</sup>

Gramsci menegaskan bahwa revolusi pasif merupakan respon yang khas kaum berjuis ketika hegemoninya terancam secara serius sehingga perlu dilakukan proses pengorganisasian kembali secara menyeluruh dalam rangka membangun kembali hegemoninya. Revolusi pasif terjadi manakala berbagai perubahan yang bersekala luas dalam struktur sosial dan ekonomi berasal dari atas, melalui agen negara, tanpa melibatkan partisipasi aktif rakyat. Revolusi sosial yang manjadi kekuatan oposisi mungkin juga berlangsung namun hanya bermaksud untuk memecah kekuatan – kekuatan ini dan melumpuhkan perjuangan rakyat. Dengan demikian, strategi yang tepat bagi kelas pekerja adalah revolusi anti pasif (*anti-passive revolution*) yang dibangun dengan memperkuat perjuangan kelas yang bersifat demokratis-kerakyatan secara terus menerus.<sup>28</sup>

Tugas menciptakan hegemoni baru, berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh kaum kapitalis, hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola pikir dan pemahaman masyarakat, ‘konsep mereka tentang dunia’ serta norma perilaku moral mereka. Gramsci membandingkan perubahan ini dengan perubahan menyeluruh terhadap

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 26.

kesadaran masyarakat yang ditimbulkan oleh reformasi oleh pretestan pada abad ke-16 dan revolusi Prancis. (ia mengambil istilah “revolusi intelektual dan moral dari penulis Prancis Geoge Sorel (1847-1922) yang mengambilnya dari Ernest Renan dari bukunya yang berjudul *La Reforme Intellectuale et Morele*).<sup>29</sup>

Dalam penjelasan proses reformasi intelektual dan moral, Gramsci menghapuskan antara Marxisme sebagai filsafat dan Marxisme sebagai kesadaran aktual masyarakat. Dia mengatakan bahwa “semua manusia adalah filosof,” karena laki-laki dan perempuan mempunyai konsep tentang dunia serta seperangkat gagasan yang memungkinkan mereka memahami kehidupan. Namun, cara mereka mempersepsikan Dunia, filsafat mereka, seringkali rancu dan bertentangan, karena pemikiran mereka berasal berbagai sumber dan dari kajian masa lalu, yang cenderung mereka menerima ketidakadilan dan penindasan sebagai hal yang alamiah dan tidak dapat diubah. Gramsci memakai istilah pemikiran awam (*common sense*) untuk menunjukkan cara orang awam yang tidak kritis dan tidak sadar dalam memahami dunia. Pemikiran awam tidak harus dilihat dalam pengertian negatif semata-mata; ia juga mempunyai unsur positif, dan aktifitas praktis mereka, perlawanan mereka terhadap penindasan, mungkin berlawanan dengan gagasan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 26.

sadar mereka. Pemikiran awam merupakan tempat dibangunnya ideologi, juga menjadi perlawanan terhadap ideologi itu.<sup>30</sup>

Aspek hubungan kekuasaan – pertentangan antara ekonomi-korporasi dan hegemoni, pentingnya perjuangan nasional-kerakyatan serta watak perjuangan ideologis. Masyarakat kapitalis dipahami sebagai ancaman yang rumit dari hubungan antara dua kelas besar: pemodal dan buruh. Hubungan sosial ini terjelma dalam berbagai organisasi dan lembaga yang terdiri dari gereja, partai politik, serikat dagang, media massa, lembaga kebudayaan dan lembaga sukarela. Satu perangkat lembaga, yaitu intitusi negara, terpisah dari intitusi ini karena menguasai monopoli kekerasan. Semua hubungan sosial dan orgaisasi ini (kecuali negara dengan watak koersifnya) dinamakan Gramsci dengan masyarakat sipil (*civil Society*).<sup>31</sup>

Masyarakat sipil adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi-kerakyatan. Jadi, masyarakat sipil adalah wadah yang disatu kelompok sosial yang dominan mengatur konsensus dan hegemoni. Masyarakat sipil juga merupakan suatu wadah dimana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*) dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif – hegemoni tandingan (*counter-hegemony*).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 28



Kelas yang sedang bergerak menuju hegemoni masyarakat sipil juga harus meraih kepemimpinan dalam bidang produksi. Hal ini semata-mata karena kaum burjuis melakukan kontrol yang ketat atas proses produksi sehingga mereka pun dapat juga menjadi kelas hegemoni dalam masyarakat sipil dan meraih kekuasaan negara. Namun kontrol kaum kapitalis atas produksi tidak pernah mutlak; kontrol itu selalu ditentang oleh kaum pekerja, dan juga terdapat perjuangan yang mereka lakukan melalui serikat dagang yang mereka dirikan atas kondisi kerja yang mereka alami dan masuknya mesin-mesin baru. Metafor tentang struktur dasar dan struktur atas, bagaimanapun juga, tidak memuaskan. Adalah keliru jika kita berfikir bahwa terdapat pemisahan tegas antara ekonomi (penghasilan nilai tambah) dan bidang politik (perjuangan meraih perjuang negara). Sebaliknya hubungan sosial masyarakat sipil berkaitan erat dengan hubungan produksi. Walaupun *The prison Notebook* memuat banyak referensi mengenai 'struktur dasar dan struktur atas', arah pemikiran Gramsci, dan penolakannya terhadap ekonomisme, berseberangan dengan hal itu. Sebaliknya ia menggunakan istilah dengan blok historis (*historic bloc*) untuk menunjukkan cara yang dilakukan kelas hegemonik dalam memadukan kepemimpinan dari suatu kelompok kekuasaan sosial dalam masyarakat sipil dengan kepemimpinan dalam bidang produksi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.29.

Marxisme – Leninisme mempunyai kecenderungan bahwa kekuasaan itu terpusat dalam negara dan tujuan dari strategi revolusioner adalah merebut kekuasaan, setelah kekuasaan direbut oleh kelas pekerja maka pembangunan sosialisme dapat dimulai.

Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil juga merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan juga bisa merata keseluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Gramsci menggunakan istilah negara integral untuk menjelaskan konsepsi yang baru mengenai watak kekuasaan ini, yang dianggapnya sebagai 'hegemoni yang dilapisi kekerasan.' Dengan demikian, perjuangan politik kelas pekerja menuju sosialisme tidak boleh sebatas untuk merebut kekuasaan negara, tetapi harus diperluas pada seluruh masyarakat sipil, karena hal itu menjadi syarat untuk melakukan kontrol terhadap negara.<sup>34</sup>

Dalam salah satu paragraf penting *Prison Notebooks* Gramsci membandingkan masyarakat sipil dan sistem 'pemerintahan dan kekuatan' yang kuat berdiri di belakang negara. Ia juga membuat perbandingan antara bangsa Tsar dengan Barat:

Di timur neraga adalah segalanya, masyarakat sipil adalah promodial dan lemah; di Barat, terdapat hubungan yang serasi antara

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.30.

negara dan masyarakat sipil, dan ketika negara mengalami goncangan maka struktur masyarakat sipil segera menghentikannya.<sup>35</sup>

Jadi kekuasaan bangsa Tsar Rusia sangat terpusat pada negara dan perebutan kekuasaan dalam suatu peristiwa sejarah mungkin terjadi. Namun, di negara-negara yang masyarakat sipilnya sudah maju, seperti di Eropa Barat, 'perang gerakan' harus memberi jalan bagi pelaksanaan strategi yang berbeda yaitu: 'perang posisi.' Revolusi merupakan proses memperluas hegemoni kelas pekerja – dengan membangun blok sejarah baru – dan bukan merupakan sebuah penghancuran total yang berlangsung sesaat yaitu ketika kekuasaan negara lepas dari suatu kelas ke kelas lain. Jadi, transisi menuju sosialisme terdiri dari dua proses yang berbeda yang saling berkaitan: tumbuhnya hegemoni kelas pekerja, dan transformasi negara menuju bentuk negara sosialis.<sup>36</sup>

#### **4) Konsep Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan esensi dari bagaimana seseorang atau kelompok bisa mempengaruhi orang atau kelompok lain. Sehingga segala sesuatu dari apa yang menjadi yang diinginkan atau tujuan dari yang menguasai bisa tercapai. Jadi, kekuasaan berdasarkan pandangan politik merupakan bagian kegiatan yang menyangkut dari masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kebanyakan beralih untuk

---

<sup>35</sup> SPN 238

<sup>36</sup> Simon Roger, *Gagasa – Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004. him. 32.

memperjuangkan kekuasaan ini untuk mengakomodir kepentingan orang banyak.

Pandangan sosial terhadap kekuasaan yang di mana menurut osiip K. Flechtheim mengatakan kekuasaan sosial adalah “keseluruhan dan kemampuan, hubungan – hubungan dan proses – proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan – tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan”.<sup>37</sup> Jadi, kekuasaan politik dan tujuan politik saling mempengaruhi dan bergantung satu sama yang lain.

Sedangkan dalam pandangan Deliar Noer dalam pengantar ilmu politik menyebutkan: “ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan ini tidak terlepas pada bidang hukum semata – mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuh pada sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelumnya negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. Hanya dalam zaman modern inilah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.”<sup>38</sup>

Sesorang mempunyai kekuasaan dan mempunyai legetimasi untuk mengatur, mempengaruhi, memerintah dan otoritas kepada orang atau kelompok lain. Hal ini akan melibatkan pertanyaan terkait apa dan mengapa seseorang tersebut mempunyai kekuasaan serta sumbernya dari mana? Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Misalnya seseorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan kepada

---

<sup>37</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 19

<sup>38</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan; Dwipa, 1956), hlm. 56

terhadap pegawainya. Dalam kedua kasus ini, bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin atau melakukan korupsi.<sup>39</sup>

Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Hal ini seseorang yang memiliki kekayaan yang memiliki kekuasaan dalam memengaruhi politik dan akan mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Kebanyakan para alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang akan diperhitungkan dalam pembuatan keputusan di tempat itu.<sup>40</sup>

Selanjutnya perlu pembedaan antara istilah yang menyakut konsep, yaitu cakupan kekuasaan menuju pada kekuasaan, perilaku, sikap dan keputusan – keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan.<sup>41</sup> Misalnya seorang pimpinan perusahaan yang mempunyai kekuasaan untuk memecat kariawannya yang melanggar aturan – aturan perusahaan dan pimpinan perusahaan tidak ada kekuasaan diluar hubungan kerja perusahaan tersebut.

Istilah wilayah kekuasaan (*domain of power*) menjawab pertanyaan siapa – siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, Dalam hal ini menunjukan pada perilaku, kelompok organisasi atau

---

<sup>39</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007 hal. 62

<sup>40</sup> *Ibid* hal. 62

<sup>41</sup> *Ibid* hal. 62

kolektivitas yang kena kekuasaan.<sup>42</sup> misalnya perusahaan induk mempunyai kekuasaan kepada unit cabang perusahaan tersebut.

Dalam suatu hubungan kekuasaan (*power relationship*) selalu ada yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan yang tidak seimbang atau asimetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan (*dependency*); dan lebih timpang hubungan ini, lebih besar pula sifat ketergantungannya. Hal ini oleh generasi pemikir dekade 20-an sering disebut sebagai dominasi, hegemoni, atau penundukan.<sup>43</sup>

Otoritas/ wewenang (*Authority*) dan Legitimasi (*Legitimacy*) suatu hal yang masih dibicarakan dalam konsep kekuasaan. Dalam kerangka pembahasan mengenai wewenang perlu disebut pembagian menurut sosiolog terkenal Max Weber (1864 - 1922) dalam tiga macam wewenang, yaitu tradisional, kharismatik dan rasional-legal. Wewenang berdasarkan tradisional merupakan keniscayaan seseorang untuk menjadi pemimpin yang berdasarkan tradisi atau budaya yang patut untuk dihormati. Wewenang Kharismatik merupakan kemampuan seorang pemimpin yang memimbul kepercayaan masyarakat dalam kekuatan mistik atau religious seorang pemimpin. Dan sedangkan wewenang Rasional-legal berdasarkan pada tatanan hukum yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang menjadi titik fokusnya bukan pemimpinnya tapi merupakan aturan yang mendasari tingkah lakunya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid* hal, 63

<sup>43</sup> *Ibid* hal, 63

<sup>44</sup> *Ibid* hal 64

Selain konsep wewenang yang dikenal juga dengan konsep legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan).<sup>45</sup> keabsahan merupakan keyakinan masyarakat wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut untuk dipatuhi serta dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi masyarakat bahwa yang penguasa sesuai dalam asas – asas atau ketentuan – ketentuan yang pada umumnya masyarakat mengetahui hal tersebut bahwa hal tersebut tidak ada pelanggaran dan bersifat sah.

Jika dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar – dasar dan tujuan – tujuan masyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur paksaan yang dipakai oleh setiap rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Maka dari itu pemimpin dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat hal itu merupakan dukungan yang paling mantap.<sup>46</sup> Pengaruh dan Kekuasaan selalu bersamaan dalam pembahasan yang tidak bisa dilepaskan salah satunya. Pada hakekatnya sebagian masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan bisa mengadakan sanksi dan pengaruh.

Pengaruh sangat berperan dalam menentukan perilaku seseorang, dan sering bersaing dengan faktor lain. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang – kadang

---

<sup>45</sup> *Ibid* hal. 64

<sup>46</sup> *Ibid* hal. 65

mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan arena itu sering kali cukup berhasil.<sup>47</sup>

### 5) Ekonomi – Korporasi

Gramsci memberikan sumbangan defenisi terkait Marxis klasik yang lahinya konsep kelas. Sumbangan yang nyata analisisnya mengenai hubungan kekuatan politik. Ia mengambil contoh dalam lahirnya kapitalis, dan membedakan tiga fase perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase yang pertama adalah ekonomi-korporatif (serin disingkat dengan korporasi) sedangkan ketiga adalah fase hegemoni.<sup>48</sup>

Skema 1.1

**Struktur Piramida Ekonomi-Korporasi Antonio Gramsci : Analisis pikiran Marxis Klasik dalam Hubungan Kekuasaan**



<sup>47</sup> *Ibid* hal, 67

<sup>48</sup> Simon Roger, *Gagasan – Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 34.



Selanjutnya dalam penjelasan kelas Marxis klasik dari fase – fase Gramsci di antaranya : Fase pertama ; ini merupakan yang paling awal terjadi ketika pedagang perlu sejajar dengan lain, seorang pengusaha dengan penguasa lainnya. Namun di sini pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok proposional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu, namun mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung kelompok lain ke dalam kelompok yang sama. Fase kedua ; fase ini di mana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas, namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya sebatas hukum dengan kelompok yang berkuasa: ‘ hak untuk serta dalam penetapan undang – undang dan administrasi, bahkan untuk mengubah memang diakui , namun harus tetap berada dalam struktur dasar yang ada.’

Dan fase ketiga ; adalah fase hegemoni, “di mana orang menjadi sadar bahwa kepentingan perusahaannya, dalam perkembangan masa sekarang dan mendatang, melampaui batas – batas korporasi kelas yang bertindak murni ekonomi, dan kepentingan itu dapat dan harus menjadi kepentingan dari kelompok yang lebih renda’. Ini adalah tahap murni politik. Ini adalah fase di mana ideologi – ideologi yang sebelumnya terpecah – pecah sekarang bersaing sampai salah satunya, atau gabungan dari ideologi – ideologi itu, memang bisa menyatukan tujuan – tujuan ekonomi, politik, intelektual dan moral dan serta ‘mampu menghadapi semua persoalan sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam dataran korporasi namun dalam dataran ‘universal’,

yang pada akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kuat terhadap kelompok lain yang lebih rendah.”<sup>49</sup>

Penguasa dan pengusaha memiliki suatu dasar persamaan dan perbedaaan dalam peran dan statusnya di publik. Dari sisi persamaan, dua elemen ini sama – sama bagian yang mendominasi pada golongan yang lain, sehingga dengan hal ini membuat kelompok yang lebih rendah merasa ketergantungan atas kebutuhan hidupnya. Dari sisi penguasa yang memiliki kekuatan kekuasaan, yang dimana memiliki berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan publik mulai dari ekonomi, sosial, politik, hukum dst. Dan sama halnya pada elemen pengusaha yang sangat kuat dalam hal kekuatan finansial, yang akan mempengaruhi berbagai macam stabilitas kekuasaan dan kebijakan maupun bagi publik itu sendiri.

#### **6) Kroni Kapitalisme**

David C. Kang dalam bukunya *Crony Capitalism Corruption and Development in South Korea and The Philipines (2002)* membuat tipologi yang berguna untuk memahami relasi *politico-buseness*. Matrik berikut menggambarkan hubungan antara penguasa dengan pihak bisnis menjelaskan tipe hubungan serta besaran dana yang dipindahkan untuk mendapatkan proteksi maupun kemudahan bisnis (*policy for sale*). Matriks di bawah untuk merupakan penyederhanaan model korupsi dengan melihat sejerajat

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 35.

konstelasi politik (terfragmentasi dan tersentralisasi) di satu pihak dengan derajat kompetisi antara pelaku ekonomi (kompetisi atau molopoli).<sup>50</sup>

**Matriks.1.1**

**Relasi Koruptif terhadap Konstelasi Politik dan Bisnis**

		Konstelasi Politik	
		Fragmented	Sentralis
Konstelasi Bisnis	Monopoli	<u>Rent-Seeking</u> ,Tipe: Botton-up jumlah Sedang	<u>Legalized corruption</u> Tipe: Simbiosis Jumlah : Besar
		4	3
	Kompetitif	<u>The Highest Bidder</u> Tipe: Win-win jumlah: kecil	<u>Predatory State</u> Tipe Top-Down Jumlah Sedang
		1	2

Tipelogi yang pertama adalah model transaktif. Model ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik multipartai. Kondisi di mana kekuasaan terbesar dalam kutup-kutup dengan kekuasaan yang seimbang serta kekuasaan (otoritas) cukup kuat untuk mendikte dan mempengaruhi kebijakan, model alokasi sumber daya, pemberian kontrak, konsesi serta proyek dilakukan dengan transaktif. Pada model ini penguasa akan memberikan privilese kepada pengusaha yang bisa memberikan penawaran tinggi. Akan tetapi, 'pemenang' akan selalu berganti tergantung kesanggupan memberi tawaran lebih sehingga pada tipelogi ini belum terjadi hubungan permanen yang membentuk kroni bisnis.

<sup>50</sup> Sumbuh Gersang Revolusi, *Mengusut Guruta Istan*, Intellectual (Datamedia), Yogyakarta, 2010

Model kedua adalah *Predatory*. Tipelogi ini terjadi pada kondisi di mana kekuasaan penguasa sudah berkonsolidasi ataupun otoritas yang dimiliki cukup kuat untuk menepoli produk kebijakan maupun alokasi sumber daya. Pada kasus-kasus yang terjadi di daerah, di mana kekuasaan nyaris tanpa kontrol serta tiadanya kelompok bisnis yang berkompetisi alokasi proyek, membuat politisi lokal leluasa menjarah sumber daya publik.

Pada tipelogi ketiga, korupsi sudah menjadi legal. Kekuatan dan kewenangan sudah tersentralisasi pada politik tertentu dan minim kontrol dari pihak oposisi baik dari kelompok politik lainnya serta kelompok warga dan media. Di sisi lain, kekuatan finansial kelompok bisnis sudah cukup untuk menyokong kebutuhan pembiayaan politik rezim. Oleh karena itu, pola hubungan berlandaskan simbiosis dan langgeng. Instrumen kebijakan dijadikan landasan untuk memonopoli sektor-sektor ekonomi.

Tipelogi terakhir adalah *ren-seeking* di mana kelompok bisnis terkonsolidasi dan memiliki sumber daya finansial yang memadai sedangkan kekuasaan terfragmentasi pada kelompok-kelompok. Di sini, kelompok bisnis yang mendikte kebijakan yang sesuai dengan orientasi kelompok bisnis tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dalam katagori sedang dan tidak sebesar pada tipelogi *legalized corruption* karena belum terjadi monopoli pada (hampir) seluruh sektor penyelenggara Negara dan ekonomi, kewenangan kelompok politik masih terbatas pada beberapa sektor saja.

Dari hubungan bisnis yang dibentuk atas jaringan kroni ini kemudian memunculkan kapitalisme baru berbentuk kapitalisme kroni. Istilah

kapitalisme kroni mengacu pada oligarki ekonomi. Di mana akses-akses menuju bisnis utama Negara dikuasi oleh orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat. Dalam kapitalisme kroni Negara digunakan sebagai agen untuk memajukan kepentingan swasta kroni atau pebisnis yang dekat dengan kekuasaan. Setumpuk penelitian secara empiris dan komperatif menunjukkan bahwa para konglomerat di Negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan pebisnis sejati. Pengusaha ini menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik. Walaupun masih ada mekanisme pengaturan perbankan sekalipun para pengusaha bisa menghindarinya karena relasi yang mereka punya dengan birokrasi yang merumuskan kebijakan.

#### **F. Definisi Konsepsional**

##### **1) Hegemoni Pengusaha**

Hegemoni merupakan dominasi dari seseorang atau suatu kelompok terhadap orang atau kelompok lain. Dimana dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaan, yang bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan sehingga menjadi kelompok hegemoni.

Hegemoni disini diambil dari konsepnya Gramsci yang berbeda makna dari konsep Lenin. Di mana Lenin memandang hegemoni sebagai kekuatan politik dari kaum proletariat dan burjuis kritis untuk reformasi pemerintahan Tsar di Rusia, sedangkan Gramsci memandang hegemoni merupakan metodeologi meraih kekuasaan dan tindakan setelah

mendapatkan kekuasaan yang berbentuk hegemonik dengan cara kekerasan dan persuasi.

## 2) Reproduksi Kekuasaan

Penguasa merupakan kelompok yang memiliki modal finansial yang kuat dalam bidang ekonomi dan politik. Kekuatan yang dimiliki dipergunakan untuk regulasi kekuasaan.

Perspektif Gramsci merumuskan ada tiga fase untuk memperoleh kekuasaan. Dari status sebagai pengusaha sampai menjadi korporasi setara dengan penguasa. Mulai dari pengusaha yang ingin menyamakan kedudukan dengan yang pengusaha lain ataupun penguasa, *kedua* pengusaha sudah mulai memasuki dalam bidang kepentingan ekonomi kepada penguasa namun tidak bergerak secara ideologi hanya menkedepankan kepentingannya, dan *ketiga* fase hegemoni, di mana hal ini sudah terjadi kesetaraan antara pengusaha dan penguasa yang bergerak secara ideologi. Menyatukan berbagai macam kepentingan masing – masing, mulai dari hal politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah – laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Perangkat lunak dari kekuasaan adalah pengaruh. Dimana hal ini, tidak semua orang yang mempunyai pengaruh yang sama walau kedudukannya sama. Dan kekuasaan merupakan dominasi yang kecil secara

kuantitasnya dibanding dengan yang dikuasai, defenisi ini berbentuk piramida.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mekukan penelitian guna untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini bersandarkan pada aspek studi pemikiran tokoh. Karena dijadikan obyek penelitian ini adalah karya yang dihasilkan oleh seorang tokoh, dalam hal ini Antonio Gramsci, maka studi yang penulis lakukan merupakan studi deskriptif.

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini berupa penelitian *kulitatif diskriptif* yang di mana suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan dari objek yang diteliti.<sup>51</sup>

Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau mengungkapkan konsepsi pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni pengusaha sebagai makanisme reproduksi kekuasaan selanjutnya disandingkan dengan praktek kekuasaan SBY di kabinet Indonesia Barsatu jilid II .

### **2) Teknik Pengumpulan Data**

Persoalan selanjutnya adalah strategi pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *Libery research*

---

<sup>51</sup> Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983

(studi kepustakaan). Teknik ini merupakan upaya pencarian data dengan menelusuri dan *me-recover* buku atau tulisan pengarang sendiri serta dokumentasi lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.<sup>52</sup>

Studi kepustakaan ini selain bersumber pada buku atau tulisan Antonio Gramsci, juga melibatkan karya – karya penunjang dari berbagai sumber yang mencoba menafsirkan pemikiran antonio gramsci. Tujuannya adalah membrikan jalinan intelektual dan ruang diaogis dalam memahami teks – teks Gamsci.

Validitas data menggunakan metode kombinasi dari fakta lapangan berdasarkan kondisi stabilitas politik nasional memalui fenomena yang hadir di permukaan yang diungkapkan oleh media massa, media cetak, dan elektronik.

### **3) Teknik Analisis Data**

Analisa data pada penelitian ini dimaksud untuk mengungkap dan menggamabarkan pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni pengusaha sebagai makanisme reproduksi kekuasaan dengan praktek kekuasaan SBY di kabinet Indonesia Barsatu jilid II .Maka metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisa berdasarkan atas pandangan, pendapat , pemikiran dan bukan pada data – data yang bersifat statistik. Menurut Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitaitif

---

<sup>52</sup> Masdar Umaruddin, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hal 20



menupakan prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata terlulis maupun lisan dari orang – orang yang akan dianalisa.<sup>53</sup> Dengan mengklasifikasi data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan gejala dari objek yang diteliti dengan menginterpertasikan fenomena – fenomena yang ada, muncul dan terjadi. Sehingga dari interpertasi itu dapat memberikan suatu deskripsi secara holistik mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>53</sup> Bogdan dan Taylor dalam Ixey J moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung, 1990, hal 3